

PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MELESTARIKAN BUDAYA DAN PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA

Oleh :
Putu Ronny Angga Mahendra *)

ABSTRACT

Cultural and character building development is more important when Indonesian enter the globalization era which are full of challenges. Foreigner civilization impacts brought by the globalization era continuously are able to influence the Indonesian nation's attitude and morality. When entering the declaration of Indonesian independence, most Indonesian citizen tend to give a more priority to shared interest for Indonesian nation than, tribe, group, religion, regional term, private and group one. The nation nationality spirit flames in the chest of all Indonesian nation by concentrating in one objective, that is to arrogate and also defend the independence. On the diverge recent condition, the foreigner's cultural and character building influence the Indonesian's one that's specially as an impact of modernity and globalization effect.

The research result shows in term of building the nation character, PKn (civics) has to play a main role as : (i) a curricular program at all formal and informal educational institutions, (ii) a social-cultural movement of citizen, (iii) a nationality political education for government apparatus, leader and membership of social and political organization. The three roles have to consider as one. The curricular program has a role as a citizen firmament opener, the social and political movement are as a breaking in the citizen's dividers and the nationality political education is as the citizen's partition emphasizing.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Pernyataan ini merupakan ungkapan yang lumrah dan sering muncul dari masyarakat kita sebagai bangsa. Menyadari bahwasanya kemerdekaan yang diperoleh saat sekarang ini bukan merupakan usaha yang mudah, dan tidak berproses dengan cepat, maka pernyataan di atas benar adanya. Kemerdekaan yang telah kita dapatkan, telah kita kumandangkan dalam proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan suatu jembatan emas untuk mengantarkan bangsa ini menuju pada kejayaannya sebagai bangsa yang bermartabat. Bangsa yang mandiri, maju, dan mampu mewujudkan seluruh cita-cita bangsa sebagai suatu keinginan yang mulia & luhur bagi segenap

masyarakat bangsa. Akan tetapi, hal ini tentunya tidaklah suatu usaha yang mudah untuk dilakukan, demi tercapainya hal tersebut. Membutuhkan suatu usaha yang meliputi segenap komponen dari bangsa Indonesia, segenap kemampuan, & segenap aspek kehidupan bangsa. Pembangunan budaya dan karakter bangsa (*cultural and character building*) merupakan komitmen nasional yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Dalam berbagai dokumen sejarah politik maupun ketatanegaraan, telah tercatat bahwa pembangunan budaya serta karakter bangsa merupakan salah satu kehendak para pendiri Negara (*founding fathers*) yang perlu dilakukan secara berkesinambungan, seperti misalnya teks yang terdapat dalam naskah Sumpah Pemuda, naskah Proklamasi, naskah Pembukaan UUD'45

serta yang tercermin dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu-lagu perjuangan lainnya. Jadi pembangunan budaya dan karakter bangsa merupakan komitmen bersama bangsa Indonesia yang harus dilaksanakan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pembangunan budaya dan karakter bangsa akan menjadi semakin lebih penting ketika bangsa Indonesia mulai memasuki era globalisasi yang penuh dengan tantangan. Pengaruh peradaban bangsa asing yang dibawa oleh arus globalisasi secara terus menerus mempengaruhi perilaku dan moralitas bangsa Indonesia. Ketika menjelang proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, hampir semua warga/bangsa Indonesia cenderung mengutamakan sisi kepentingan bersama bangsa Indonesia daripada kepentingan pribadi & kelompok, golongan, suku, agama, maupun daerah. Semangat nasionalisme membara di dada sebagian besar bangsa Indonesia dengan konsentrasi satu tujuan yaitu merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Hal ini berbeda dengan kondisi terkini, dimana budaya dan karakter bangsa lain banyak mempengaruhi karakter & moralitas bangsa Indonesia, terutama sebagai dampak dari pengaruh modernisasi dan globalisasi.

Pembangunan budaya dan karakter bangsa pada hakikatnya merupakan pengakuan atas hak-hak warganegara sebagai kompensasi dari masyarakat pluralis yang demokratis. Hak-hak warga sipil, hak asasi manusia & hak keadilan sosial dikembangkan dalam suasana yang demokratis dalam masyarakat madani, Amendemen UUD'45 semakin meningkatkan kehidupan demokratis yang menjamin pengakuan terhadap hak-hak warga sipil. Kebebasan individu dalam berinovasi & berekspresi semakin terbuka lebar. Semangat reformasi yang didukung era globalisasi telah mendorong kemajuan dalam demokratisasi. Namun masa transisi dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang dikendalikan pemerintahan otoriter, menuju suasana kehidupan yang lebih demokratis sebagaimana tuntutan semangat

reformasi, telah memunculkan berbagai fenomena sosial yang mempengaruhi sisi karakter dan moralitas warganegara.

Budaya luhur (*high cultural*) dan karakter bangsa semakin terdistorsi oleh merebaknya pengaruh budaya global yang setiap hari dilihat dan didengar melalui berbagai saluran informasi. Etika berperilaku, sopan santun, keramah-tamahan, tolong menolong dan semangat kekeluargaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia tergusur oleh semangat demokratisasi yang seringkali diartikan sebagai kebebasan yang seluas-luasnya, Gaya hidup yang individualis, materialistis dan liberalis berkembang pesat seiring dengan merebaknya pengaruh globalisasi yang bersumber dari masyarakat barat. Kemajuan teknologi telah membawa berbagai dampak degradasi lingkungan, lokalisme demokratis, dan multi kulturalisme. Semua masalah yang disebut belakangan ini merupakan tantangan berat dalam revitalisasi peran warga sipil, khususnya melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

Tantangan besar ke depan lainnya bagi bangsa Indonesia adalah menumbuhkan budaya dan kehidupan demokrasi (*cultural democracy*) pada berbagai komponen masyarakat, dimulai dari elit politik, para birokrat dalam pemerintahan, dunia usaha, aneka lembaga swadaya masyarakat, para kaum intelektual, hingga masyarakat luas. Pembentukan struktur pada pemerintahan yang demokratis tanpa diimbangi dengan tumbuhnya kehidupan demokrasi akan menjurus pada lahimya kehidupan demokrasi yang semu seperti yang pernah terjadi dalam pemerintahan Indonesia pada periode-periode sebelumnya. Oleh karena itu, pembinaan pemahaman akan prinsip-prinsip serta cara hidup yang demokratis adalah salah satu tantangan mendasar bagi pendidikan nasional dalam membentuk serta mengembangkan kehidupan dan masyarakat yang semakin demokratis.

Sistem pendidikan nasional sebagaimana digariskan dalam Pasal 31 UUD 1945

beserta peraturan perundangan turunannya merupakan upaya untuk mewujudkan suatu komitmen nasional. Pada tataran kurikuler "pendidikan kewarganegaraan" baik pada substansi, proses pembelajaran, maupun efek sosiokulturalnya sengaja dirancang & diprogramkan untuk mewujudkan program-program pendidikan demokrasi yang bermuara pada pembentukan karakter bangsa Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan karakter warganegara baik karakter privat, seperti tanggung jawab moral, disiplin diri & penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu; dan karakter masyarakat, misalnya kepedulian sebagai warga, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, & kemauan guna mendengar, bernegosiasi dan berkompromi.

Tampaknya semua itu terjadi karena sekolah diperlakukan sebagai *sociopolitical institution*, dan masih belum efektifnya pelaksanaan pembelajaran serta secara konseptual, karena belum adanya suatu paradigma pendidikan kewarganegaraan yang secara ajeg diterima dan dipakai secara nasional sebagai rujukan konseptual dan operasional. Kini pada era reformasi pasca jatuhnya politik Orde Baru yang diikuti dengan tumbuhnya komitmen baru kearah perwujudan cita-cita dan nilai demokrasi konstitusional yang lebih dinamis, dikenal adanya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai jenis mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami serta mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Ini mestinya merupakan kebangkitan PKn untuk memposisikan dirinya sebagai penghela pembangunan karakter bangsa agar dapat menyiapkan generasi muda yang memiliki karakter ke-Indonesiaan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut

1. apakah yang dimaksud dengan pembangunan budaya dan karakter bangsa
2. bagaimana konsep dalam membangun budaya dan karakter ke-Indonesiaan
3. apakah peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam pembangunan budaya dan karakter bangsa?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui konsep dari pembangunan budaya dan karakter bangsa.
2. Untuk mengetahui konsep membangun budaya dan karakter ke-Indonesiaan.
3. Untuk mengetahui peran PKn dalam pelaksanaan pembangunan budaya dan karakter bangsa.

II. PEMBAHASAN.

2.1 Pembangunan Budaya dan Karakter Bangsa.

Fenomena berbagai gejolak dalam masyarakat pada beberapa tahun terakhir ini cukup memprihatinkan, antara lain: munculnya karakter buruk yang ditandai dengan kekerasan dan kekejaman. Bangsa Indonesia yang dikenal ramah, tamah, penuh sopan santun dan pandai berbasa-basi sekonyong-konyong menjadi pemarah dan suka mencaci. Dalam aspek alam fisik dan alam hayati, juga mengalami proses penurunan kualitasnya. Alam fisik Indonesia dikenal subur & makmur, mulai bermunculan tanah-tanah kritis, longsor atau tandus ketika kemarau. Dalam aspek alam hayati, telah kehilangan hutan tropis yang semakin tahun semakin cepat berkurangnya. Kekayaan alam hayati yang berasal dari laut yang diambil secara *illegal* oleh penjarah dari dalam maupun luar negeri. Dalam aspek manusia, kualitas daya saing Indonesia juga lebih memprehatinkan. Dalam aspek budaya juga semakin memudar kecintaan terhadap kesenian tradisional sebagai bentuk warisan budaya bangsa, Fenomena masyarakat dewasa ini semakin menonjolkan kepentingan daerah dan golongan daripada kepentingan bangsa dan negara.

Kondisi di atas tentu perlu segera dicarikan upaya memperbaikinya, karena

kita tidak berharap fenomena tersebut berkembang semakin parah. Kita tidak menghendaki kehilangan karakter sebagai bangsa sehingga akan kehilangan atau penurunan kualitas lingkungan & kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu perlu mencermati dengan sungguh-sungguh apa sebenarnya yang menjadi sumber terjadinya berbagai jenis fenomena tersebut. Fenomena yang merugikan ini dapat dijelaskan secara sosiologis karena ini memiliki kaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu. Dampak kehidupan masyarakat pasca reformasi yang memprihatinkan ini menurut Dasim (2007) diakibatkan oleh beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat dewasa ini, sebagai berikut.

Pertama, satu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbang struktur kekuasaan "otokrasi" yang dimainkan Rezim Orde Baru ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh melainkan oligarki dimana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat (*demos*) tetap masih jauh dari sumber-sumber kekuasaan (wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya).

Tampaknya semua simbol yang dinilai ampuh untuk dapat memobilisasi rakyat digunakan oleh kelompok-kelompok kecil ini demi memaksakan kehendak mereka di era reformasi ini. Semua ini terjadi baik disadari maupun tidak oleh para elit yang memang sedang mengidap "*myopia politik*" yakni hanya berorientasi pada Pemilu bukan pada tujuan jangka panjang. Dengan demikian semua arah moral bangsa praktis dikuasai oleh kelompok kecil & cenderung bersifat partisan dan primordial (Wirntomo, 2001 :6). Namun kita masih bisa berharap karena masih melihat adanya kelompok-kelompok dalam masyarakat yang masih menampilkan karakter yang baik, misalnya bersifat, *nasionalis, inklusif universalistik, altruistik* dan sebagainya. Aspirasi tersebut

sesungguhnya banyak didukung oleh masyarakat luas (*silent majority*), tetapi gerakan-gerakan sosial yang memperjuangkan nilai-nilai ini masih lemah dan sporadik. Mereka belum bergabung dalam jaringan yang solid dan mampu melakukan gebrakan besar yang berskala nasional, sehingga cenderung tenggelam oleh gerakan yang punya dana.

Kedua, sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung (*socio-cultural animosity*). Gejala ini muncul dan semakin menjadi-jadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Ketika rezim Orde Baru berhasil dilengserkan, pola konflik di Indonesia ternyata bukan hanya terjadi antara pendukung fanatik Orde Baru dengan pendukung Reformasi, tetapi justru meluas menjadi konflik antar suku, antar umat beragama, kelas sosial, kampung, dan lain sebagainya. Sifatnya pun bukan vertikal antara kelas atas dengan kelas bawah tetapi justru lebih sering horizontal, antar sesama rakyat kecil, sehingga konflik yang terjadi bukan konflik yang korektif tetapi destruktif (bukan fungsional melainkan disfungsional), sehingga kita menjadi sebuah bangsa yang menghancurkan dirinya sendiri (*self destroying nation*).

Ciri lain dari konflik yang terjadi di Indonesia adalah bukan hanya yang bersifat terbuka (*manifest conflict*) melainkan lebih berbahaya lagi adalah konflik yang tersembunyi (*latent conflict*) antara berbagai golongan. *Socio-cultural animosity* adalah suatu kebencian sosial budaya yang bersumber dari perbedaan ciri budaya dan perbedaan nasib yang diberikan oleh sejarah masa lalu, sehingga terkandung unsur keinginan balas dendam. Konflik terselubung ini bersifat laten karena terdapat mekanisme sosialisasi kebencian yang berlangsung pada hampir seluruh pranata sosial di masyarakat (mulai dari keluarga, sekolah, kampung, tempat ibadah, media massa, organisasi massa, organisasi politik dan lain sebagainya).

Tak bisa dipungkiri bahwa kebencian sosial budaya terselubung ini sangat ber-

hubungan dengan pluralitas negara-bangsa Indonesia. Contoh nyata lain, hancurnya Yugoslavia akibat semakin menipisnya *in-group feeling* di antara etnis yang ada, sementara katup penyelamat (*safety valve institution*) untuk mengurai kebencian sosial budaya terselubung tidak bekerja efektif. Namun hal ini bukan faktor penentu, karena banyak masyarakat plural yang lain bisa membangun *platform* budaya yang mampu menghasilkan kerukunan antar etnis pada derajat yang cukup mantap. Sebagai contoh masyarakat Malaysia dengan konsep pembangunan sosial budayanya telah berhasil menyiapkan *civic culture* sebagai suatu kesepakatan budaya untuk membangun kerukunan antar kelompok rasial dan agama. Kontlik politik sekeras apapun yang terjadi di wilayah Malaysia, tidak pernah mengusik kesepakatan ini (Wirutomo, 2001:7). Berbeda halnya dengan yang terjadi di daerah Indonesia bahwasannya setiap perbedaan pandangan politik selalu ditarik lagi kepada faktor perbedaan budaya yang paling mendasar (terutama agama). Inilah yang membuat persoalan politik tidak pernah mudah diselesaikan.

Jika menengok pada proses integrasi bangsa Indonesia, persoalannya terletak pada kurangnya mengembangkan bentuk kesepakatan nilai secara alamiah dan partisipatif (*integrasi normative*) dan lebih mengandalkan pendekatan kekuasaan (*integrasi koersif*). Atas dasar kenyataan demikian maka cita-cita reformasi untuk membangun Indonesia Baru harus dilakukan dengan cara membangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis yang mempunyai karakter ke-Indonesiaan yang adaptif pada era global.

Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan ilmu pengetahuan & teknologi yang amat pesat sekali, terutama teknologi informasi dan komunikasi, telah mengubah dunia seakan-akan menjadi kampung dunia (*global village*). Dunia menjadi transparan tanpa mengenal batas antar negara. Kondisi

yang demikian itu berdampak pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di samping itu, dapat pula mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak seluruh masyarakat Indonesia. Fenomena globalisasi telah menantang kekuatan penerapan unsur-unsur karakter bangsa. Kenichi Ohmae (1999:24) mengatakan bahwa dalam perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah negara dalam arti geografis dan politik relatif masih tetap. Namun kehidupan dalam suatu negara tidak mungkin dapat membatasi kekuatan global yang berupa informasi, inovasi, dan industri yang membentuk suatu peradaban modern.

2.2 Membangun Budaya dan Karakter Ke-Indonesiaan

Peradaban modern yang lahir dari ibu kandung globalisasi ternyata menimbulkan sejumlah persoalan dan kekecewaan. Eric Fromm (1997:30) menjelaskan perkembangan Eropa sebagai perkembangan peradaban modern. Tema sentral perkembangan peradaban modern ini menurut pendapatnya adalah timbulnya kebebasan (*freedom*), yang terjadi pada level individu maupun masyarakat. Pada level individu kebebasan itu diawali timbulnya *self* (diri) dalam proses *individuation*. Ketidak-terpisahan antara sisi individu dengan lingkungannya, memberikan pada individu perasaan aman (*security feeling*), perasaan kebersatuan (*belongingness*) dan perasaan bahwa ia mengakar (*rooted*) pada sesuatu. Diperolehnya sisi kebebasan oleh individu itu berarti hilangnya ikatan rasa aman dan menyatu pada pada individu yang berganti dengan suatu kekhawatiran (*anxiety*), ketidakberdayaan (*powerless*), kemenyendirian (*aloneless*), keterombang-ambing (*uprootedness*), keraguan (*doubt*) yang kesemuanya itu bermuara pada sikap permusuhan (*hostility*).

Perkembangan kepribadian pada level masyarakat juga menentukan proses *individuation* sepanjang sejarahnya, yang mana masyarakat Barat merupakan hasil perjuangan, yang dapat disebut hasil per-

juangan kebebasan. Pada level individu, kebebasan ini berupa terainya kebebasan dari segala macam kekuasaan baik dari gereja, negara, atau eksploitasi ekonomi. Namun kebebasan level individu, berdampak pada munculnya kegelisahan (*anxiety*), kehilangan kekuatan (*powerless*), kesendirian (*aloneless*), tidak mengakar (*uprootedness*), keragu-raguan (*doubt*), dan permusuhan (*hostility*).

Melalui proses kebebasan itu, Eric (1997:56) melukiskan timbulnya sistem kapitalisme, yang pernah terjadi pada abad ke-15 (abad pertengahan atau abad kegelapan) & abad ke-16 (abad Reformasi Gereja ataupun timbulnya Protestanisme). Kapitalisme pada abad ke-15 mula-mula berkembang di Italia, yang antara lain disebabkan laut Merah menjadi jalur kegiatan perdagangan Eropa, & dekatnya ke Dunia Timur (termasuk Arab/Islam), sehingga kebudayaan Timur bisa diboyong ke Eropa. Kapitalisme yang timbul adalah kapitalisme bangsawan. Perekonomian dilakukan di atas landasan etik yang kuat (persaudaraan) sehingga sedikit sekali persaingan. Akibatnya akumulasi kapital berjalan sangat lambat walaupun dalam sistem perdagangan tersebut kapital masih berperan sebagai pengendali perdagangan.

Sejak abad memasuki ke-10, yakni ketika Reformasi Gereja, kelas menengah menjadi mencuat ke atas sebagai akibat lecutan Luther dan Calvin. Mereka mendambakan harta kekayaan (sebagai simbol keberhasilan). Inti ajaran mereka yang terpenting adalah kemandirian & mengandalkan usaha sendiri dengan berjerih payah. Inilah segi positif dari kapitalisme sebagaimana dilecut oleh Protestanisme, yang tema sentralnya adalah kebebasan. Namun segi negatifnya, sebagaimana diungkapkan di muka adalah terjadinya perasaan tidak aman (*insecurity feeling*), kegelisahan (*anxiety*), kehilangan kekuatan (*powerless*), dan sebagainya.

Dari analisis itu, Eric menyimpulkan bahwa di samping orang membutuhkan sisi kebebasan (*freedom*), ia juga memerlukan

ketergantungan (*dependensi/submissiveness*). Akibat kebutuhan *submissiveness* itu tidak terpenuhi, maka kebebasan menjadi tidak bermakna lagi. Maka timbulah satu mekanisme untuk tujuan melarikan diri dari kebebasan atau *escape from freedom* berupa melukai diri sendiri (*masochism*), melukai orang lain (*sadism*), melenyapkan objek atau saingan (*destructiveness*), dan mengekor secara serempak (*automaton*) (Budimansyah, 2008:65).

Kapitalisme Barat dan masyarakat modern sebagaimana telah diterangkan oleh Eric, memiliki karsa (*will*) yang kuat (seperti kemandirian, percaya diri, jerih payah), akan tetapi tercipta pula masyarakat yang goyah. Kegagalan itu ditimbulkan oleh tiadanya ketenangan batin (*insecurity feeling*) akibat melupakan nilai-nilai agama.

Suatu tuntutan moralitas baru misalnya telah diteriakkan oleh Revolusi Prancis: "*liberte, egalite, fratermite*" (kebebasan, persamaan, dan persaudaraan), akan tetapi sampai saat ini tampaknya hanya "kebebasan" yang diperoleh, sedangkan "persamaan" masih jauh tertinggal. Hal ini terutama disebabkan karena moral "persaudaraan" hampir tidak mengalami kemajuan yang berarti dalam peradaban modern ini. Hal ini juga terjadi pada masyarakat Indonesia pada era reformasi dimana semua kalangan terlenda oleh euforia kebebasan. Semua lapisan masyarakat hendak merengguk kebebasan yang seluas-luasnya, sementara semangat persaudaraan sebagai bangsa semakin terpuruk dan akibatnya persamaan dan keadilan sulit untuk diwujudkan. Hal itu menjauhkan diri dari semangat persaudaraan, dan gaya hidup kekeluargaan sebagaimana yang menjadi inti dari karakter ke-Indonesiaan, Semangat persaudaraan dan gaya hidup kekeluargaan masih harus dibangun dalam masyarakat kita sebelum semakin jauh dari karakter ke-Indonesiaan.

Kebangkitan moral baru diharapkan mampu melandasi pranata sosial & menghasilkan hubungan sosial yang lebih baik antar masyarakat dan negara serta warga negara (Bellah, 1999:88). Ia mengatakan

bahwa semua jenis kejadian yang telah merendahkan martabat manusia adalah hasil dari pilihan-pilihan kita (*social choicest* yang kemudian kita bakukan dalam pranata sosial. Untuk merombaknya perlu dilakukan sesuatu pemilihan-pemilihan yang baru, ini membutuhkan suatu sistem nilai, karena semua pilihan memiliki landasan moral dan etika.

Menganalisis pranata-pranata sosial berarti mempertanyakan: "bagaimana kita seharusnya hidup?" dan "bagaimana kita berpikir tentang bagaimana kita hidup?", Pranata-pranata sosial yang telah mengatur bagaimana kita hidup ternyata berjalan kurang baik atau tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya kita akan inginkan (*ideal values*). Jadi *ideal values* hanya tersimpan dalam khasanah budaya kita, tapi tidak secara efektif mengatur perilaku kita dalam pranata sosial yang ada (Wirutomo, 2001 : 35).

Kekecewaan terhadap peradaban modern juga diungkapkan oleh seorang sosiolog Amerika Serikat lainnya yang bernama Amitai Etzioni (1993:45) dengan memberi contoh masyarakat negaranya sendiri, Amerika Serikat (USA). Masyarakat Amerika Serikat, menurut Etzioni, perlu mengembangkan nilai-nilai atas keakuannya (*individualisme*) yang telah berakar pada budaya mereka dengan nilai-nilai kekitaan yang bersifat komunitarian. Dengan kata lain harus adanya keseimbangan antara hak (yang berorientasi pada keakuan) dan kewajiban (yang berorientasi pada hak orang banyak). Pemikiran ini sangat relevan untuk mengoreksi fenomena yang terjadi pada masyarakat kita yang sejak masa penjajahan sampai masa Orde Baru selalu dilecehkan hak-haknya oleh pemerintah dan negara, dalam masa reformasi ini sekonyong-konyong mengidap gejala "*strong sense of entitlement*" yaitu cenderung menuntut hak (bila perlu secara paksa dan kekerasan) akan tetapi segan menerima kewajiban bagi kepentingan umum.

Etzioni (1993:55) menyadari terbentuknya masyarakat komunitarian hanya dapat

terwujud melalui suatu gerakan sosial yang sistematis. Itulah sebabnya ia bersama kelompoknya mencanangkan satu kebulatan tekad gerakan "komunitarian" sebagai berikut :

1. masyarakat harus mampu menciptakan suatu moralitas baru yang tidak mengganggu kehidupan pribadi orang (sikap *anti puritanisme*).
2. masyarakat mempertahankan suatu "hukum serta keteraturan" tanpa harus jatuh pada suatu "negara polisi" dengan merancang secara hati-hati kewenangan dan kekuasaan pemerintah.
3. masyarakat harus menyelamatkan sisi kehidupan keluarga tanpa harus membatasi diri atas hak anggotanya secara diskriminatif.
4. sekolah harus mampu memberikan pendidikan moral, tanpa harus mengindoktrinasi anak muda.
5. masyarakat harus memperkuat kehidupan komunitas tanpa menjadi orang fanatik dan saling bermusuhan terhadap komunitas lain.
6. individu harus meningkatkan tanggung jawab sosial bukan sebagai suatu pembatasan hak-hak kita, melainkan justru sebagai perimbangan dari hak-hak yang kita peroleh. Semakin besar hak yang diterima, semakin besar pula kewajiban yang perlu ditanggung.
7. perjuangan kepentingan pribadi harus diimbangi dengan komitmen pada aspek komunitas, tanpa harus menjadi korban bagi kelompok. Oleh karena itu, maka keserakahan individu yang tanpa batas harus diganti dengan "kepentingan yang pribadi" yang bermanfaat secara sosial dan memperoleh peluang yang disahkan oleh masyarakat.
8. kewibawaan pemerintah harus dijaga tanpa menghilangkan kesempatan bagi semua warga menyampaikan pendapat dan kepentingannya.

Semua itu adalah inti dari sikap moral komunitarian yang ditawarkan oleh Etzioni, yakni kesepakatan manusia modern untuk menciptakan moral baru, kehidupan sosial,

dan keteraturan publik berdasarkan pada penguatan kembali nilai "kebersamaan", tanpa adanya *puritanisme* dan penindasan. Semangat mengembangkan moral baru bagi peradaban modern yang telah mengalami kegagalan ini juga tampak dari pemikiran Giddens dalam "*The Third Way*" dimana ia gigih memperjuangkan demokrasi sosial yang berintikan solidaritas, kesamaan dan keamanan serta peran aktif negara (Wirutomo, 2001: 150).

Konsep karakter ke-Indonesiaan ini pada dasarnya mengacu pada sikap moral komunitarian yang bercorak kepribadian Indonesia yang sangat dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan norma yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Membangun karakter ke-Indonesiaan dengan demikian merupakan suatu proses memberikan posisi warganegara yang lebih mandiri terhadap negara, membina etos demokrasi yang bukan sekedar menekankan hak individual dan supremasi hukum, melainkan terutama menekankan pada pembenahan moral hubungan antarwarganegara itu sendiri, penanaman nilai kerukunan yang menghasilkan kepedulian terhadap semua warga negara dan nasib seluruh bangsa.

2.3 Peran Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu mata pelajaran di Sekolah Dasar yang mempunyai tugas profesional untuk membina para siswa agar menjadi generasi penerus yang sebagaimana diharapkan bangsa maupun negara dalam konteks pembinaan generasi muda menjadi seorang warganegara yang baik. Anak adalah warganegara hipotetik, yakni warganegara yang "belum jadi" karena masih harus dididik menjadi warganegara dewasa yang sadar akan hak dan kewajibannya (Budimansyah, 2007:25). Oleh karena itu masyarakat sangat mendambakan generasi mudanya dipersiapkan untuk menjadi warganegara yang baik dan dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan negaranya. Keinginan tersebut lebih

tepat disebut sebagai perhatian yang terus menerus tumbuh, terutama dalam masyarakat demokratis. Banyak sekali bukti yang menunjukkan bahwa tak satu pun negara, termasuk Indonesia, telah mencapai tingkat pemahaman dan penerimaan terhadap hak-hak & tanggungjawab di antara keseluruhan warganegara dalam menunjang kehidupan demokrasi konstitusional.

Masyarakat hendaknya menyadari bahwa PKn sangat penting untuk tetap mempertahankan kelangsungan demokrasi konstitusional. Sebagaimana yang selama ini dipahami bahwasannya *ethos* demokrasi sesungguhnya tidaklah diwariskan, tetapi dipelajari dan dialami. Hal ini menegaskan bahwa setiap generasi adalah masyarakat baru yang harus memperoleh pengetahuan, mempelajari keahlian, dan mengembangkan karakter atau watak publik maupun privat yang sejalan dengan demokrasi konstitusional. Sikap mental ini harus dipelihara dan dipupuk melalui perkataan dan pembelajaran serta keteladanan. Demokrasi bukanlah "mesin yang akan berfungsi dengan sendirinya", tetapi harus selalu secara sadar direproduksi dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Oleh karena itu, PKn seharusnya diberdayakan untuk membentuk generasi muda yang berkarakter Indonesia. PKn perlu difungsionalkan sebagai pengemban tugas untuk membentuk warganegara yang bertanggung jawab, efektif, kreatif dan terdidik. Demokrasi dipelihara oleh warganegara yang mempunyai pengetahuan, kemampuan dan karakter yang dibutuhkan. Tanpa adanya komitmen yang benar dari warganegara terhadap nilai dan prinsip fundamental demokrasi, maka masyarakat yang terbuka dan bebas, tidak mungkin terwujud. Oleh karena itu, tugas bagi para pendidik, pembuat kebijakan, dan anggota *civil society* lainnya, adalah mensosialisasikan pentingnya PKn bagi seluruh lapisan masyarakat dan semua pranata sosial yang ada di dalam masyarakat. PKn sudah menjadi bagian inheren dari instrumentasi serta praksis pendidikan nasional untuk

mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor "*value-based education*". Konfigurasi atau kerangka sistemik PKn dibangun atas dasar paradigma sebagai berikut (Budimansyah, 2008: 102).

Pertama PKn secara kurikuler telah dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab, *Kedua*, PKn secara teoretik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat *konfluen* ataupun saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide-ide, nilai-nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. *Ketiga*, PKn secara programatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang selalu mengusung nilai-nilai (*content-embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experiences*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntunan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide-ide, nilai-nilai, konsep, serta moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan aspek bela negara.

Namun sejak diimplementasikan pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan (persekolahan maupun perguruan tinggi), PKn menghadapi berbagai kendala serta keterbatasan. Kendala dan keterbatasan tersebut adalah: (i) masukan instrumental (*instrumental input*) terutama yang berkaitan dengan aspek kualitas guru/dosen serta keterbatasan fasilitas dan sumber belajar, dan (ii) masukan lingkungan (*environmental input*) terutama yang berkaitan dengan kondisi dan situasi kehidupan politik negara yang kurang demokratis. Dengan demikian, pelaksanaan PKn tidak mengarah pada misi sebagaimana seharusnya. Beberapa indikasi empirik yang menunjukkan salah

arah tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

Pertama, proses pembelajaran dan penilaian dalam PKn lebih menekankan pada dampak instruksional (*instructional effects*) yang terbatas pada penguasaan materi (*content mastery*) atau dengan kata lain hanya menekankan pada dimensi kognitifnya saja. Sedangkan pengembangan dimensi-dimensi lainnya (afektif dan psikomotorik) serta pemerolehan dampak pengiring (*nurturant effects*) sebagai "*hidden curriculum*" belum mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Kedua, pengelolaan kelas belum mampu menciptakan suasana kondusif dan produktif untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa/mahasiswa melalui perlibatannya secara proaktif dan interaktif baik dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas (*intra dan ekstra kurikuler*) sehingga berakibat pada miskinnya pengalaman belajar yang bermakna (*meaningful learning*) untuk mengembangkan kehidupan serta perilaku siswa-siswa/mahasiswa.

Ketiga, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sebagai wahana sosiopedagogis untuk mendapatkan "*hands-on experience*" juga belum memberikan kontribusi yang signifikan untuk menyeimbangkan antara penguasaan teori dan praktek pembiasaan perilaku dan keterampilan dalam berkehidupan yang demokratis dan sadar hukum.

Indikasi-indikasi tersebut melukiskan begitu banyaknya kendala kurikuler dan sosial-kultural bagi PKn untuk menghasilkan suatu totalitas hasil belajar yang mencerminkan pencapaian secara komprehensif (menyeluruh) dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang koheren dan konfluen. Hasil belajar PKn yang belum mencapai keseluruhan dimensi secara optimal seperti digagaskan itu berarti menunjukkan bahwa tujuan kurikuler PKn belum dapat dicapai sepenuhnya.

Selain menghadapi kendala internal sebagaimana diuraikan di atas, PKn juga

menghadapi kendala eksternal yaitu kritikan & tuntutan dari berbagai lapisan masyarakat berkaitan dengan semangat demokratisasi yang semakin meningkat dengan segala aksesnya. PKn yang secara paradigmatis sarat dengan muatan afektif namun tetap dilaksanakan secara kognitif telah disikapi secara keliru sebagai satu-satunya obat mujarab (*panacea*) untuk mengatasi aneka persoalan kehidupan para siswa khususnya yang menyangkut perilaku & moral. Namun demikian, kritikan dan tuntutan tersebut sudah seharusnya direspons & diakomodasikan secara proporsional karena memang pendidikan secara umum dan PKn secara khusus bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga tanggung jawab seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Tanggung jawab bersama untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas pada hakekatnya merupakan perwujudan dari amanat nasional.

Kendala eksternal lainnya yaitu pendidikan di Indonesia dihadapkan pada berbagai persoalan dan situasi global yang berkembang cepat setiap waktu baik yang bermuatan positif maupun yang bermuatan negatif atau bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Ketidakmampuan bangsa Indonesia dalam merancang program pendidikan yang mengakomodasikan kecenderungan dan persoalan global tersebut berarti akan menghilangkan kesempatan untuk mengejar ketertinggalan untuk secara bertahap dapat mensejajarkan dirinya dengan bangsa-bangsa yang sudah maju dalam bidang pendidikannya.

III. PENUTUP

3.1 Simpulan

Beberapa hal yang menjadi upaya untuk membina karakter dan budaya bangsa melalui pemberdayaan PKn antara lain dengan sebagai berikut.

Pertama, PKn sebagai satu program kurikuler pada lembaga pendidikan formal maupun nonformal yang berperan sebagai wahana pemuliaan maupun pemberdayaan

anak dan pemuda sesuai dengan potensinya agar menjadi warganegara yang cerdas terampil dan berkarakter. Pemikiran ini didasari oleh asumsi bahwa untuk mendidik anak menjadi warganegara yang cerdas dan terampil serta berkarakter harus dilakukan secara sadar & terencana dalam suatu proses pembelajaran agar mereka secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Kedua, PKn sebagai gerakan sosio-kultural kewarganegaraan yang berperan sebagai wahana aktualisasi diri warganegara baik secara perorangan maupun kelompok sesuai dengan hak-hak, kewajiban, dan konteks sosial budayanya, melalui partisipasi aktif secara cerdas & bertanggung jawab. Pemikiran ini didasari oleh asumsi bahwa kewarganegaraan bertalian dengan masyarakat, karena disamping secara historis konsep tersebut tumbuh bersamaan dengan perkembangan identitas manusia sebagai makhluk sosial, politik dan budaya. Analisis sosiologis terhadap perkembangan masyarakat kita dewasa ini menunjukkan bahwa akar dari berbagai masalah sosial budaya ini dapat digolongkan ke dalam empat masalah dasar yang perlu menjadi sebuah agenda dalam gerakan sosio-kultural kewarganegaraan, yakni masalah kerukunan, kepedulian, kemandirian dan demokrasi.

Ketiga, PKn sebagai program pendidikan politik kebangsaan bagi para penyelenggara negara, anggota & pimpinan organisasi sosial dan organisasi politik yang dikemas dalam berbagai bentuk pembinaan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*), dan kebajikan kewarganegaraan (*civic disposition*) yang mengacu pada prinsip-prinsip konseptual pedagogis untuk mengembangkan daya nalar (*state of mind*), bukan wahana indoktrinasi politik.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk membangun karakter bangsa, PKn harus memainkan peran sebagai sebuah program

kurikuler pada lembaga pendidikan formal maupun nonformal, sebagai gerakan sosio-kultural kewarganegaraan, dan sebagai pendidikan politik kebangsaan bagi para penyelenggara negara, pimpinan dan anggota organisasi sosial dan organisasi politik. Ketiga peran tersebut harus dilihat sebagai satu kesatuan. Program kurikuler merupakan pembuka cakrawala kewarganegaraan, gerakan sosio-kultural sebagai pendobrak sekat-sekat kewarganegaraan, & pendidikan politik kebangsaan merupakan penegas partisipasi kewarganegaraan.

3.2 Saran-Saran/Rekomendasi

PKn merupakan salah satu cara yang mampu digunakan sebagai jembatan dalam mencapai suatu keaaan yang dinamakan "*Masyarakat Madani / Civil Society*", suatu konsep masyarakat idaman yang menjadi cita-cita kehidupan berbangsa. Dalam hal ini PKn juga akan mampu membentuk sebuah pembangunan karakter kebangsaan yang kuat & kokoh di tengah globalisasi era sekarang. Perlu kiranya suatu konsep keilmuan yang mantap serta mampu mengayomi timbulnya keadaan atau kondisi tersebut. PKn mesti mampu dikembangkan dengan konsep 5 M, yaitu : mengenal, memahami, menghayati, mengamalkan & merefeksi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Budimansyah, D., 2007. *Pendidikan Demokrasi Sebagai Konteks Civic Education di Negara-negara Berkembang*, *Jurnal Acta Civicus*, VolI No.1, hlm.11-26.
- Budimansyah, D., 2008. *Revitalisasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Praktik Belajar Kewarganegaraan (Project Citizen)*, *Jurnal Acta Civicus*, VoU No.2, hlm.179-198.

Kaelan, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, UGM Univ. Press, Yogyakarta.

Lasmawan, Wayan., 2004, *Pengembangan Model Pendidikan Berdemokrasi dalam Pembelajaran PPKn di Sekolah Dasar*, (Laporan Penelitian. Lembaga Penelitian IKIP Negeri Singaraja).

Lasmawan, Wayan., 2010, *Menelisik Pendidikan IPS (Dalam Perspektif Konstektual Empiris)*. Mediakom Indonesia Press Bali, Singaraja.

Solihatin, Etin., 2010, *Strategi Pembelajaran PKn*, Bumi Aksara, . Jakarta.

Subroto, Waspo Tjipto., 2006, *Bahan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar*. Unesa Unipres, Surabaya.

Wahab, Abdul Azis dan Sapriya., 2011, *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*, Alfabeta, Bandung

*) CURRICULUM VITAE



Putu Ronny Angga Mahendra lahir di Singaraja, pada tgl. 21 Juli 1987. Strata 1 Jurusan PPKn pada Fakultas Ilmu Sosial Undiksa, Singaraja tamat pada tahun 2009. S2 pada Prodi Pendidikan Dasar Pascasarjana Undiksa

tamat pada tahun 2012. Pada saat ini Penulis adalah dosen pada Prodi Sastra daerah Bali, FKIP. Uivesitas Deijendra